

ABSTRACT

The digital transformation of government demands integrated and accountable data-driven policymaking. The Yogyakarta Special Region Government (Pemda DIY) has developed an Integrated Data Management Center (IDMC) as a supporting instrument for Smart Province, but its utilization as a data-driven decision-making infrastructure has not been optimal. This study aims to analyze the state of IDMC data governance and assess the capacity and readiness of Regional Apparatus Organizations (OPDs). The study used a qualitative, descriptive-analytical approach through in-depth interviews with 13 OPDs, documentation studies, expert and stakeholder validation, and thematic analysis.

The results indicate that IDMC data governance has a regulatory foundation and a clear role structure, but operational and cultural integration remains partial. Technical interoperability, real-time data updates, and consistent utilization across OPDs are not yet optimal, resulting in governance still dominated by regulatory pillars rather than normative and cultural ones. In terms of capacity, OPDs are in an emerging stage, where awareness of data literacy and dashboard utilization are beginning to develop, but the ability to reconfigure bureaucratic routines into data-driven work systems is still lacking. Disparities still exist in the standardization of SOPs, system interoperability, and institutionalization of data-driven practices. Thus, the IDMC serves as a repository and accountability instrument, but has not yet been fully integrated into a systemic and sustainable decision-making infrastructure.

Keywords: *Digital Transformation of Government; Data Governance, Integrated Data Management Center (IDMC), Data-Based Policy Making, Regional Apparatus Organiza*

ABSTRAK

Transformasi digital pemerintah menuntut pembuatan kebijakan berbasis data yang terintegrasi dan akuntabel. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) telah mengembangkan Pusat Manajemen Data Terpadu (IDMC) sebagai instrumen pendukung Smart Province, namun pemanfaatannya sebagai infrastruktur pengambilan keputusan berbasis data belum optimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola data IDMC dan menilai kapasitas serta kesiapan Organisasi Aparatur Daerah (OPD). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dengan 13 OPD, studi dokumentasi, validasi ahli dan pemangku kepentingan, serta analisis tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data IDMC memiliki landasan regulasi dan struktur peran yang jelas, namun integrasi operasional dan budaya masih parsial. Interoperabilitas teknis, pembaruan data secara real-time, dan pemanfaatan yang konsisten di seluruh OPD belum optimal, sehingga tata kelola masih didominasi oleh pilar regulasi daripada pilar normatif dan budaya. Dari segi kapasitas, OPD (Operating Processing Department) berada pada tahap awal, di mana kesadaran akan literasi data dan pemanfaatan dasbor mulai berkembang, tetapi kemampuan untuk mengkonfigurasi ulang rutinitas birokrasi menjadi sistem kerja berbasis data masih kurang. Masih terdapat kesenjangan dalam standardisasi SOP (Standard Operating Procedures), interoperabilitas sistem, dan pelebagaan praktik berbasis data. Dengan demikian, IDMC (Integrated Data Management Center) berfungsi sebagai repositori dan instrumen akuntabilitas, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam infrastruktur pengambilan keputusan yang sistemik dan berkelanjutan.

Keywords: Transformasi Digital Pemerintah; Tata Kelola Data, Pusat Manajemen Data Terpadu (IDMC), Pembuatan Kebijakan Berbasis Data, Kapasitas Organisasi Aparat Daerah (OPD)